

Kode / Rumpun Ilmu : 561 / Ekonomi Pembangunan

ABSTRAK
RINGKASAN EKSEKUTIF (*EXECUTIVE SUMMARY*)
PENELITIAN HIBANG BERSAING



STUDI KOMPARATIF INKLUSI KEUANGAN
DI KABUPATEN JEMBER DAN BONDOWOSO :
IDENTIFIKASI PENYEBAB DAN STRATEGI PENGEMBANGAN MODEL

TIM PENELITI

Adhitya Wardhono, S.E, M.Si, M.Sc, Ph.D	(Ketua Peneliti)	NIDN. 0005097105
Ciplis Gema Qoriah, S.E, M.Sc	(Anggota Peneliti 1)	NIDN. 0014077708
Yulia Indrawati, S.E, M.Si	(Anggota Peneliti 2)	NIDN. 0030077906

LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS JEMBER

November, 2016

**STUDI KOMPARATIF INKLUSI KEUANGAN
DI KABUPATEN JEMBER DAN BONDOWOSO :
IDENTIFIKASI PENYEBAB DAN STRATEGI PENGEMBANGAN MODEL**

**Adhitya Wardhono, S.E, M.Si, M.Sc, Ph.D
Ciplis Gema Qoriah, S.E, M.Sc
Yulia Indrawati, S.E, M.Si**

**Jurusan IESP - Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
Sumber Dana : DRPM Kemenristek Dikti Tahun 2016**

Email :

adhitya71@gmail.com; ciplisqoriah@gmail.com; yuliaindrawati2012@gmail.com

ABSTRAK

Inklusi keuangan memberikan gambaran *unbanked population* terbatasnya akses masyarakat terhadap sistem keuangan formal baik dalam aktifitas menabung, pembayaran, kredit dan asuransi. Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso sebagai barometer pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jawa Timur khususnya di daerah Eks Karesidenan Besuki Raya menjadikan program inklusi keuangan sebagai prioritas pembangunan. Hasil determinasi inklusi keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso pada tahun pertama menjadi kerangka acuan untuk mengembangkan model inklusi keuangan dan perumusan sintesa kebijakan di inklusi keuangan di dua Kabupaten tersebut. Sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut yang bertujuan untuk, 1) menganalisa kondisi, potensi, dan kendala pertumbuhan inklusi keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso, 2) menyusun kerangka kerja model inklusi keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso dan 3) merumuskan mekanisme dan evaluasi pengembangan model inklusi keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, analisis SWOT dan model logit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara agregat tingkat inklusi keuangan di Kabupaten Bondowoso dan Jember sudah cukup baik yang diindikasikan dengan ketersediaan jumlah lembaga perbankan yang cukup dengan fasilitas pelayanan keuangannya. Namun sebagian masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau keuangan yang disebabkan oleh ketersediaan layanan yang masih relatif jauh dari masyarakat dan tingkat literasi keuangan yang masih rendah dan tertutupnya informasi dari masyarakat akibat ketakutan dan kekhawatiran dengan pemberi jasa keuangan individu lainnya. Ketersediaan infrastruktur sistem layanan perbankan sudah cukup memadai melalui konsep *Branchless Banking* dan Layanan Keuangan Digital (LKD) sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan perbankan. Namun beberapa kendala masih dihadapi seperti keamanan sistem dari tindak penipuan menjadi perhatian penting dalam sistem layanan perbankan.

Kata Kunci : Inklusi Keuangan, Determinan, Model, Strategi, Regional

RINGKASAN EKSEKUTIF

STUDI KOMPARATIF INKLUSI KEUANGAN DI KABUPATEN JEMBER DAN BONDOWOSO : IDENTIFIKASI PENYEBAB DAN STRATEGI PENGEMBANGAN MODEL

Adhitya Wardhono, S.E, M.Si, M.Sc, Ph.D
Ciplis Gema Qoriah, S.E, M.Sc
Yulia Indrawati, S.E, M.Si

Jurusan IESP - Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
Sumber Dana : DRPM Kemenristek Dikti Tahun 2016

Email :

adhitya71@gmail.com; ciplisqoriah@gmail.com;
yuliaindrawati2012@gmail.com

1. Pendahuluan

Hasil survey Bank Dunia dan Bank Indonesia terkait dengan program inklusi keuangan menunjukkan rendahnya tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap lembaga keuangan. Survei Bank Dunia (2011) menunjukkan bahwa di Indonesia hanya 19,6 persen orang dewasa (*adult*) yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal. Angka tersebut di bawah Vietnam 21,4 persen, Filipina 26,5 persen, India 35,2 persen, Malaysia 66,7 persen dan Thailand 77,7 persen. Sementara berdasarkan hasil survey Neraca Rumah Tangga dari Bank Indonesia (2010) bahwa 62 persen rumah tangga tidak memiliki tabungan sama sekali. Indonesia masih berada pada posisi terendah dalam inklusi keuangan dibandingkan dengan negara ASEAN. Tercatat hanya 18,2 persen perusahaan di Indonesia yang memperoleh kredit dari bank dan hanya 8,5 persen masyarakat yang memperoleh kredit dari bank. Bahkan dalam peringkat *Ease of Doing Business* dan *Getting Credit*, Indonesia masih relatif kecil yaitu peringkat tujuh di ASEAN dan hanya lebih tinggi dari Kamboja, Laos dan Myanmar (<http://ekbis.sindonews.com>).

Berdasarkan hasil analisis determinan inklusi keuangan masyarakat di Kabupaten Jember dan Bondowoso, diperoleh kesimpulan bahwa secara agregat inklusi keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso menunjukkan karakteristik pola inklusi yang sama dan sudah cukup baik. Hal ini diindikasikan dengan

ketersediaan jumlah lembaga perbankan yang cukup dengan fasilitas pelayanan keuangannya, kebutuhan masyarakat terhadap jasa lembaga keuangan formal dan intensitas keterlibatan masyarakat dalam penggunaan jasa lembaga keuangan formal. Namun sebagian masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau keuangan yang disebabkan oleh tingkat literasi keuangan yang masih rendah dan tertutupnya informasi dari masyarakat akibat ketakutan dan kekhawatiran dengan pemberi jasa keuangan individu lainnya. Sementara akses masyarakat terhadap fasilitas kredit keuangan khususnya kredit usaha cukup tinggi dan menjadi indikasi potensial dalam mengembangkan sektor riil.

Kondisi ini memberikan gambaran bahwa kebutuhan terhadap sektor keuangan sangat penting dalam mendukung dinamika kegiatan masyarakat. Penyusunan dan pemetaan kondisi, potensi, dan kendala pertumbuhan inklusi keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso perlu dibuat dengan tujuan tercapainya sasaran akhir inklusi keuangan yang optimal dan diperlukan susunan kerangka kerja model pengembangan inklusi keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso serta mekanisme dan evaluasi pengembangan model untuk mendukung Bank Indonesia dan Otoritas Jasa keuangan dalam mengambil keputusan untuk menaikkan pertumbuhan inklusi keuangan masyarakat di Kabupaten Jember dan Bondowoso.

Berdasarkan tingkat keterjangkauan masyarakat yang tergolong rendah atas akses keuangan dimana akses keuangan merupakan *growth engine* dalam pencapaian peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka program inklusi keuangan menjadi agenda penting bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam program pembangunan khususnya sektor keuangan. Karena sektor keuangan yang didukung oleh industri perbankan memiliki peran besar hampir 80 persen dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi melalui fungsi intermediasi lembaga keuangan sehingga inklusi keuangan perlu ditingkatkan.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kondisi, potensi, dan kendala pertumbuhan inklusi keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso; (2) menyusun kerangka kerja model pengembangan inklusi keuangan di Kabupaten Jember dan

Bondowoso; dan (3) menyusun alur mekanisme dan evaluasi pengembangan model inklusi keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso.

2. Tinjauan Pustaka

Inklusi keuangan memberikan gambaran *unbanked population* terbatasnya akses masyarakat terhadap sistem keuangan formal baik dalam aktifitas menabung, pembayaran, kredit dan asuransi. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan yang didesain untuk mengeliminir berbagai kendala terhadap akses keuangan (Hannig dan Jansen, 2010). Hanning dan Jensen (2010) membagi empat faktor dalam mengukur perkembangan inklusi keuangan di suatu negara. Beberapa faktor tersebut adalah aksesibilitas, kualitas, pemanfaatan dan dampak. Akses dan ketersediaan mengukur akses masyarakat pada lembaga keuangan formal. Hal ini mencakup sisi penawaran dari jasa keuangan seperti kredit, tabungan, pembayaran dan sistem kliring dan sebagainya. Maka untuk mengevaluasi akses dan ketersediaan, potensi kendala seperti geografis dan infrastruktur harus diidentifikasi. Untuk menentukan tingkat aksesibilitas, maka determinan utama diestimasi sebagai proporsi terhadap jumlah penduduk yang dapat mengakses jasa keuangan.

Sarma dan Pais (2008) meneliti mengenai hubungan antara inklusi keuangan dan pembangunan. Dengan menggunakan indeks inklusi keuangan, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi inklusi keuangan. Tingkat pembangunan manusia dan inklusi keuangan memiliki korelasi yang besar. Sementara faktor sosial ekonomi seperti pendapatan memiliki hubungan positif dengan inklusi keuangan. Begitu halnya dengan pentingnya faktor lain seperti ketidakmerataan, literasi dan urbanisasi. Infrastruktur fisik memiliki hubungan yang signifikan dengan inklusi keuangan. Sementara untuk variabel perbankan NPA dan CAR memiliki hubungan negatif dengan inklusi keuangan.

Studi Chattopadhyay (2011) meneliti inklusi keuangan di West Bengal dengan menggunakan dimensi dalam indeks inklusi keuangan. Hasil studi menunjukkan bahwa Kolkata memiliki nilai indeks inklusi tertinggi dan diikuti Darjeeling. Berdasarkan hasil survey bahwa sekitar 38 persen responden merasa belum memiliki pendapatan cukup untuk membuka rekening di bank dan rata-rata rentenir masih

mendominasi sebagai sumber pembiayaan di masyarakat pedesaan dibandingkan lembaga keuangan formal.

Jaising (2013) meneliti inklusi keuangan di Ghana. Hasil studi menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia memiliki korelasi yang signifikan dengan inklusi keuangan di Ghana. Sementara kendala dalam inklusi keuangan adalah masih tingginya biaya transaksi dan infrastruktur. Meskipun pemerintah memberikan regulasi pengawasan dan perijinan namun lembaga yang ada tidak mematuhi peraturan yang ada. Oleh karena itu perlu adanya payung hukum yang jelas terhadap lembaga keuangan yang informal sehingga masyarakat dapat mengakses keuangan dengan biaya rendah dengan persyaratan minimum.

Kharchenko (2011) meneliti determinan literasi keuangan dan implikasinya terhadap perilaku menabung di Ukraina. Dengan menggunakan data survei *Financial Literacy and Awareness in Ukraine* dari *Financial Sector Development Project* (FINREP) dan USAID tahun 2010. Hasil studi menunjukkan determinan utama yang mempengaruhi literasi keuangan di Ukraina adalah *gender*, tingkat pendidikan, pekerjaan, wilayah dan kekayaan. Usia dan tempat tinggal tidak signifikan mempengaruhi literasi keuangan. Implikasi literasi keuangan terhadap perilaku menabung tidak memiliki pengaruh langsung pada saat kekayaan dapat dikontrol.

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *explanatory research* karena memberikan gambaran atau deskripsi mengenai tingkat inklusi keuangan masyarakat di Kabupaten Jember dan Bondowoso. Jenis data yang digunakan adalah data primer menggunakan teknik *in-depth interview*.

3.2 Lokasi dan Sasaran Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja atau *purposive sampling* yaitu di Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso. Pertimbangan pemilihan kedua kabupaten adalah karena kedua wilayah memiliki kedekatan secara geografis dan memiliki kemiripan karakteristik sosial budaya masyarakat meskipun dengan

kondisi makroekonomi regional yang berbeda. Dari tiap kabupaten akan dipilih tiga kecamatan sebagai sampel dengan kriteria daerah maju, berkembang (moderat) dan tertinggal. Di Kabupaten Jember meliputi Kecamatan Sumbersari sebagai daerah maju, Kecamatan Wuluhan sebagai daerah berkembang dan Kecamatan Kalisat sebagai daerah tertinggal. Sementara di Kabupaten Bondowoso meliputi Kota Bondowoso sebagai daerah maju, Kecamatan Sumber Wringin sebagai daerah berkembang dan Kecamatan Tenggarang sebagai daerah tertinggal.

Sementara responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah rumah tangga di ketiga wilayah kecamatan di tiap Kabupaten yang dilakukan secara *random sampling* berdasarkan kartu keluarga pada kantor kecamatan setempat. Jumlah responden untuk tiap kecamatan adalah 20 orang sehingga total responden sebanyak 60 responden yang terdiri dari ibu rumah tangga, kalangan pekerja baik pemerintah maupun swasta dan pelajar atau mahasiswa untuk tiap Kabupaten. Total responden untuk dua kabupaten adalah 120 orang. Responden yang terpilih adalah dengan kisaran usia lebih dari 18 tahun hingga 70 tahun yang dianggap sudah matang dalam membuat keputusan dan mengelola keuangan. Kemudian juga akan menyertakan responden dari Perwakilan Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya di Kabupaten Jember dan Bondowoso.

3.3 Teknik Analisis Data

Jenis data yang akan digunakan adalah data persepsi dari responden maupun *existing data* sehingga metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif berupa deskriptif kuantitatif. Beberapa tahapan dalam teknik analisis data adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisa kondisi, potensi, dan kendala pertumbuhan inklusi keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso dengan menggunakan analisis deskriptif, SWOT, dan model ekonometrika.
2. Menyusun kerangka kerja model pengembangan inklusi keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso dengan *Survey Literature* dan *in-depth Interview*.

3. Menyusun alur mekanisme dan evaluasi pengembangan model inklusi keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso dengan *Survey Literature* dan *in-depth interview*.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Model Inklusi Keuangan Perbankan

Implementasi *financial inclusion* khususnya lembaga keuangan perbankan masih menghadapi beberapa kendala baik yang dihadapi oleh masyarakat dan lembaga keuangan perbankan. Bagi masyarakat, kendala yang dihadapi seperti tidak adanya bank di sekitar tempat tinggalnya atau memakan waktu yang cukup lama untuk menuju kantor cabang terdekat, selain itu juga tingkat pemahaman terhadap pengelolaan keuangan yang masih kurang. Adapun kendala yang dihadapi oleh lembaga keuangan perbankan antara lain adalah keterbatasan cakupan wilayah dalam memperluas jaringan kantor. Di sisi lain, untuk menambah jaringan kantor di daerah terpencil perbankan dihadapkan pada persoalan biaya pendirian yang relatif mahal.

Branchless Banking merupakan salah satu bagian dari program *financial inclusion* untuk memberikan jasa keuangan dan sistem pembayaran secara terbatas melalui unit khusus pelayanan keuangan atau agen tanpa harus melalui pendirian kantor fisik bank. Dalam *Preliminary Study Bank Indonesia (2011)* disebutkan bahwa *Branchless Banking* secara umum merupakan strategi melayani masyarakat akan jasa keuangan tanpa ketergantungan pada kantor cabang bank secara fisik atau melakukan *outsourcing* proses transaksi layanan jasa perbankan kepada pihak ketiga. Strategi tersebut merupakan pelengkap dari jaringan kantor yang telah ada untuk menjangkau konsumen yang lebih luas secara efisien.

4.1.1 Kabupaten Jember

Perkembangan model perbankan telah banyak diterapkan, salah satu jenisnya yaitu berupa *Branchless Banking* yang merupakan suatu jaringan distribusi untuk memberikan layanan finansial di luar kantor bank. Dengan adanya *Branchless Banking* memungkinkan kemudahan akses bagi nasabah maupun agen bank. Salah satu Bank yang menerapkan *Branchless Banking* yaitu salah satu kantor cabang Bank

Mandiri yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kabupaten Jember. Bank Mandiri menggunakan *Branchless Banking* berupa *Bank Led Model*.

Bank Mandiri menggunakan jasa agen untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jenis jasa yang ditawarkan oleh agen yaitu berupa setoran tunai, penarikan tunai, maupun pendaftaran *E-cash*. Jenis jasa yang paling banyak dilayani berupa setoran tunai. Agen yang bekerjasama dengan Bank Mandiri sebanyak 130 agen dengan lokasi yang berbeda-beda. Selanjutnya mekanisme yang dilakukan antara bank nasabah yaitu melalui setoran di ATM atau melalui *E-cash*.

Untuk ICT yang digunakan yaitu melalui web. Sementara itu, untuk mengawasi atau memonitor transaksi yang dijalankan oleh agen adalah dengan melalui web dengan menggunakan nomor ID yang sebelumnya telah ditentukan. Selanjutnya tidak terdapat batasan atau limit harian pada transaksi tiap agen. Persentase total dari transaksi yang dilakukan oleh agen adalah sekitar 30-90%.

Alasan Bank Mandiri menggunakan jasa agen adalah untuk bisa lebih mudah menjangkau masyarakat yang jauh dari pusat lembaga keuangan dan juga untuk mengurangi antrian yang biasanya dilakukan nasabah saat bertransaksi secara langsung di bank. Perbedaan antara penggunaan jasa agen dengan transaksi rutin bank pada umumnya antara lain berupa tidak adanya biaya administrasi.

Permasalahan yang dialami terkait penggunaan *Bank Led Model* yaitu penipuan, hacker, dan juga gangguan pada sistem. Salah satu cara untuk mengatasinya yaitu misalkan saat terjadi gangguan pada sistem, maka agen menghubungi Bank Mandiri untuk melakukan pengecekan dan kemudian Bank Mandiri memperbaiki sistem. Penggunaan jasa agen tersebut utamanya ditujukan untuk menjangkau masyarakat yang belum pernah melakukan transaksi ataupun belum pernah menggunakan dan menikmati layanan perbankan.

4.1.2 Kabupaten Bondowoso

Perkembangan model perbankan telah banyak diterapkan, salah satu jenisnya yaitu berupa *Branchless Banking* yang merupakan suatu jaringan distribusi untuk memberikan layanan finansial di luar kantor bank. Dengan adanya *Branchless Banking* memungkinkan kemudahan akses bagi nasabah maupun agen bank. Salah

satu Bank yang menerapkan *Branchless Banking* yaitu salah satu kantor cabang Bank Mandiri yang terletak di Jalan Kis Mangun Sarkoro No.69 Tamansari, Dabasah, Kecamatan Bondowoso. Bank Mandiri menggunakan *Branchless Banking* berupa *Bank Led Model*.

Pertama, untuk penerapan Bank Led Model yaitu berupa jasa pengelolaan keuangan yang meliputi setoran, penarikan tunai, maupun transfer. Terdapat beberapa agen yang saat ini digunakan dimana setiap jenis agen masing-masing mempunyai banyak nasabah. Lokasi agen yaitu sesuai dengan kesepakatan dari nasabah yang berkeinginan menjadi agen. Selanjutnya mekanisme operasional terjadi antara agen dengan bank sehingga secara otomatis terhubung dengan bank sehingga mekanisme operasional *Bank Led Model* ini menjadi mudah dan lancar sesuai dengan PTO (*Power Take Off*) yang ada.

Selanjutnya dalam rangka pemantauan terhadap transaksi yang dilakukan oleh agen yaitu dengan menggunakan laporan harian. Dari laporan tersebut dapat dilakukan pengawasan sekaligus pemantauan terhadap berjalannya penggunaan *Bank Led Model*. Sementara itu terkait transaksi yang harian yang dilakukan oleh agen diterapkan adanya pembatasan atau limit yang diatur sesuai dengan dengan sistem yang telah disepakati sebelumnya.

Belum terdapat permasalahan yang dialami oleh agen, tetapi yang perlu diwaspadai yaitu berupa penipuan-penipuan yang mungkin dilakukan oleh nasabah. Untuk itu dalam rangka mengantisipasi hal tersebut adalah dengan melakukan penghimbauan pada nasabah maupun non nasabah tentang bahaya akan penipuan sehingga mereka akan membangun sikap kehati-hatian. Selanjutnya beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh agen dalam CDD atau KYC antara lain berupa pembukaan, *single payment*, *prepaid account*, dan *mobile phone service*. Penggunaan jasa agen tersebut pada dasarnya diperuntukan bagi nasabah yang berpenghasilan tinggi, sedang, maupun rendah baik yang sudah mempunyai rekening dan belum mempunyai rekening.

4.2 Determinan Inklusi Keuangan Masyarakat di Kabupaten Jember dan Bondowoso

4.2.1 Kabupaten Jember

Determinan inklusi keuangan masyarakat di Kabupaten Jember dalam studi ini menyertakan beberapa faktor yaitu jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pendapatan, literasi, akses atau jarak lembaga keuangan. Slope variabel independen gender atau jenis kelamin tidak berpengaruh secara signifikan terhadap inklusi keuangan masyarakat di Kabupaten Jember.

Variabel usia atau age memiliki tanda positif yang artinya bahwa semakin tinggi usia individu maka peluang dalam inklusi keuangan semakin besar yaitu sebesar 1,025 kali. Hal ini sejalan dengan kriteria inklusi keuangan bahwa semakin meningkat usia maka semakin produktif dan memiliki potensi dalam mengakses sektor keuangan, mengingat usia di atas 18 tahun diasumsikan telah memiliki literasi keuangan yang cukup dan umumnya telah memiliki pekerjaan dan pendapatan sehingga memiliki peluang dalam mengelola dan mengakses keuangan pada lembaga keuangan formal.

Faktor pendidikan atau education memiliki tanda positif yang berarti bahwa kelompok masyarakat dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) ke atas memiliki peluang lebih besar dibandingkan pendidikan dibawah SMA yaitu 9,563 kali lebih besar. Hal ini disebabkan masyarakat dengan pendidikan yang semakin tinggi, diasumsikan memiliki literasi terhadap keuangan yang lebih baik dan memiliki kemampuan dalam mengakses informasi keuangan secara lebih intensif.

Temuan lainnya adalah tingkat pendapatan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap inklusi keuangan di Kabupaten Jember. Sebaran pendapatan masyarakat diatas Rp. 1.000.000,- memiliki peluang lebih besar dalam inklusi keuangan dibandingkan masyarakat dibawah Rp. 1.000.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat semakin tinggi pula kebutuhan masyarakat akan akses perbankan.

4.2.2 Kabupaten Bondowoso

Determinan inklusi keuangan masyarakat di Kabupaten Bondowoso dalam studi ini menyertakan beberapa faktor yaitu jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pendapatan, literasi, akses atau jarak lembaga keuangan. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso memiliki probabilitas masyarakat dalam inklusi keuangan yang lebih besar. Temuan menarik bahwa meskipun secara sosio ekonomi sedikit dibawah Kabupaten Jember, namun potensi pengembangan inklusi keuangan di Kabupaten Bondowoso cukup besar. Hal ini mengindikasikan tingginya minat masyarakat dalam mengakses jasa keuangan formal.

Jika dilihat dari slope variabel independen gender atau jenis kelamin bertanda negatif artinya laki-laki memiliki peluang atau probabilitas yang lebih kecil dalam inklusi keuangan dibandingkan perempuan. Dengan nilai Exp (B) sebesar 0,572 berarti laki-laki memiliki peluang 0,572 kali dari perempuan. Temuan ini sangat menarik yang terjadi di masyarakat karena umumnya laki-laki sebagai pencari nafkah utama lebih memiliki peluang dalam akses keuangan, namun ternyata perempuan memiliki peluang lebih besar. Variabel usia atau *age* tidak signifikan secara statistik mempengaruhi inklusi keuangan masyarakat. Parameter usia memiliki tanda negatif yang artinya bahwa kelompok usia muda memiliki peluang dalam inklusi keuangan yang lebih besar yaitu sebesar 0,892 kali. Hal ini lebih disebabkan kelompok usia muda umumnya memiliki tingkat literasi yang lebih baik terhadap lembaga keuangan sejalan dengan dinamika teknologi informasi yang semakin pesat dan menarik tanpa mengenal batas wilayah maupun kelompok usia.

Faktor pendidikan atau education memiliki tanda positif yang berarti bahwa kelompok masyarakat dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) ke atas memiliki peluang lebih besar dibandingkan pendidikan dibawah SMA yaitu 7,290 kali lebih besar. Selain itu dengan semakin tinggi tingkat pendidikan maka tingkat pendapatan yang diperoleh lebih besar, sehingga mampu mengakses keuangan lebih besar.

Berbeda dengan hasil di Kabupaten Jember, di Kabupaten Bondowoso tingkat pendapatan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap inklusi keuangan di Kabupaten Jember. Sebaran pendapatan masyarakat diatas Rp.

1.000.000,- memiliki peluang lebih kecil dalam inklusi keuangan dibandingkan masyarakat dibawah Rp. 1.000.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa keteraksesan masyarakat dengan pendapatan lebih kecil adalah lebih tinggi sehingga perbedaan pendapatan tidak mempengaruhi inklusi keuangan di masyarakat Kabupaten Bondowoso.

Literasi atau pemahaman masyarakat terhadap keuangan menjadi faktor utama dalam menentukan inklusi keuangan. Masyarakat diharapkan bukan hanya memiliki keterjangkauan atau inklusi keuangan namun juga diharapkan memiliki pemahaman yang baik atau *well literate* terhadap lembaga keuangan. Hal ditunjukkan bahwa semakin literate masyarakat maka akan memiliki peluang dalam inklusi yang semakin besar yang ditunjukkan oleh nilai exp (B) sebesar 59,672 kali. Dibandingkan dengan masyarakat di Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso memiliki nilai peluang yang jauh lebih besar. Hal ini sejalan dengan minat kelompok usia muda yang semakin besar terhadap jasa keuangan.

Jarak atau distance tidak memiliki pengaruh secara signifikan. Jarak tidak menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam menjangkau lembaga keuangan formal. Keberadaan lembaga keuangan formal yang semakin mudah dijangkau oleh masyarakat terutama jarak kantor bank akan menentukan tingkat inklusi masyarakat karena akan mendorong masyarakat untuk intensif dalam menabung maupun mengakses jasa keuangan formal. Hal ini mengingat dengan jarak yang semakin sulit dapat mempengaruhi motivasi masyarakat dalam mengakses lembaga keuangan dan semakin memperburuk tingkat literasi masyarakat karena informasi lembaga keuangan menjadi lebih sulit juga.

4.3 Strategi Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso

4.3.1 Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil identifikasi strategi internal inklusi keuangan di Kabupaten Jember, faktor kekuatan yang dimiliki masih lebih besar dibandingkan dengan kelemahan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa potensi internal sangat baik dari kondisi minat masyarakat dalam menabung dan memanfaatkan pendapatan mereka, serta potensi ekonomi yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya

upaya intensif bagi lembaga keuangan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa keuangan sebagai strategi kebijakan inklusi keuangan.

Sementara berdasarkan hasil identifikasi strategi eksternal inklusi keuangan di Kabupaten Jember, faktor eksternal peluang lebih besar dibandingkan dengan faktor ancaman. Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika pertumbuhan ekonomi dan dinamika pola pikir yang berkembang di masyarakat terhadap jasa keuangan tinggi serta cukup mampu dalam menangkap peluang eksternal dalam menghadapi segala kemungkinan ancaman eksternal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa potensi eksternal baik dari perkembangan dinamika global serta berkembangnya sistem dan teknologi informasi merupakan strategi untuk mengatasi ancaman dari luar. Oleh karena itu perlu adanya upaya intensif dari perbankan dalam memperkuat dan meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat Kabupaten Jember

Berdasarkan kondisi internal dan eksternal, maka posisi strategis peningkatan inklusi keuangan di Kabupaten Jember berada di daerah agresif yang mengindikasikan kebutuhan strategi yang komprehensif dan integrative, diantaranya (1) strategi meningkatkan kapasitas teknologi informasi kepada masyarakat; (2) strategi meningkatkan produksi layanan perbankan yang dapat dijangkau oleh masyarakat; (3) strategi memperkuat kelembagaan perbankan dalam upaya peningkatan inklusi keuangan; serta (4) strategi meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam menghadapi persaingan dengan lembaga keuangan non bank.

4.3.2 Kabupaten Bondowoso

Hasil pemetaan strategi inklusi keuangan di Kabupaten Bondowoso pada sisi internal memiliki selisih yang lebih besar daripada Kabupaten Jember. Hal ini mengindikasikan faktor kekuatan yang dimiliki Kabupaten Bondowoso lebih rendah daripada Kabupaten Jember, meskipun kekuatan internal masih menjadi faktor utama daripada kelemahannya.

Sementara berdasarkan hasil identifikasi strategi eksternal inklusi keuangan di Kabupaten Bondowoso, faktor eksternal peluang lebih besar dibandingkan dengan faktor ancaman dan selisih faktor eksternal Kabupaten Bondowoso lebih kecil (0,93) daripada Kabupaten Jember (1,02). Kondisi ini menunjukkan bahwa minat

masyarakat dalam hal memanfaatkan produk pelayanan perbankan tinggi yang disertai dengan berkembangnya akses mobilitas sosial ekonomi di masyarakat. Selain itu di Kabupaten Bondowoso yang tipologi masyarakat dan daerahnya jauh dari pusat ekonomi menjadikan banyaknya ragam pola pikir terhadap jasa keuangan. Tingginya perkembangan akses informasi masyarakat terhadap lembaga keuangan di Kabupaten Bondowoso cukup mampu dalam menangkap peluang eksternal dalam menghadapi segala kemungkinan ancaman eksternal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa potensi eksternal baik dari perkembangan dinamika global serta berkembangnya pola pikir masyarakat yang sadar akan fungsi dan tujuan perbankan merupakan strategi untuk mengatasi ancaman dari luar. Oleh karena itu perlu adanya upaya intensif dari perbankan dalam memperkuat dan meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan kondisi internal dan eksternal dengan nilai EFAS sebesar 0,93 dan nilai IFAS sebesar 0,52 memberikan arti posisi strategis peningkatan inklusi keuangan di Kabupaten Bondowoso berada di daerah agresif. Posisi ini memberikan arti bahwa strategi peningkatan Inklusi keuangan di Kabupaten Bondowoso, diantaranya (1) strategi meningkatkan akses informasi mengenai produk lembaga keuangan ke masyarakat; (2) strategi meningkatkan kapasitas layanan perbankan yang dapat dijangkau oleh masyarakat; (3) strategi memperkuat kebijakan perbankan dalam upaya peningkatan inklusi keuangan; serta (4) strategi meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam menghadapi persaingan dengan lembaga keuangan non bank.

4.4 Peran Perbankan dalam Peningkatan Inklusi Keuangan

Hasil pemetaan strategi inklusi keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso menunjukkan faktor internal kekuatan memiliki posisi yang cukup kuat dalam memengaruhi strategi internal lembaga perbankan dalam meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat. Hal ini mengindikasikan faktor kekuatan yang dimiliki perbankan di Kabupaten Jember dan Bondowoso lebih besar daripada faktor kelemahan yang dimiliki. Kondisi ini memberi arti bahwa faktor komponen internal perbankan cukup baik dari sisi

kekuatan seperti produk lembaga keuangan yang mempunyai brand image yang baik dan dapat menjangkau ke daerah terpencil. Faktor ini dapat maksimal jika didukung oleh monitoring perbankan terhadap pengguna jasa dan produk keuangan serta meningkatkan promosi dan sosialisasi ke masyarakat mengenai perkembangan layanan perbankan.

Faktor Eksternal perbankan dalam peningkatan Inklusi keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso berdasarkan hasil identifikasi menunjukkan faktor eksternal peluang lebih besar dibandingkan dengan faktor ancaman dan selisih faktor eksternal sebesar 1,77. Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya landasan regulasi yang jelas mengenai strategi nasional yang inklusif dapat menaikkan optimisme perbankan dalam melakukan akses keuangan kepada masyarakat. Selain itu, kondisi demografi masyarakat yang jauh akan akses informasi menjadi peluang tersendiri oleh perbankan dalam mengembangkan akses produk layanannya serta adanya kebijakan perluasan pengembangan UKM di Indonesia menjadi poin penting untuk lembaga keuangan dalam menumbuhkan inklusi keuangan di masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya upaya insentif dari perbankan dan bank sentral dalam memperkuat dan meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat Kabupaten Jember dan Bondowoso.

Berdasarkan kondisi faktor internal dan eksternal perbankan dalam pengembangan inklusi keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowos, perhitungan nilai EFAS sebesar 1,77 dan nilai IFAS sebesar 1,45 memberikan arti posisi strategis perbankan dalam peningkatan inklusi keuangan berada di daerah agresif. Posisi ini memberikan arti bahwa strategi perbankan dalam peningkatan Inklusi keuangan di Kabupaten Jember dan Bondowoso, diantaranya (1) strategi meningkatkan akses informasi dan produk perbankan ke masyarakat; (2) strategi meningkatkan penerapan *branchless banking* di masyarakat; (3) strategi meningkatkan kemudahan masyarakat dalam penggunaan produk perbankan; serta (4) strategi meningkatkan monitoring nasabah dan produk layanan perbankan yang telah diaplikasikan ke masyarakat.

Dalam hal program elektronifikasi yaitu suatu upaya untuk mengubah transaksi masyarakat yang semula dilakukan secara manual menjadi elektronik, dari metode pembayaran secara tunai menjadi non tunai, serta pelaku transaksi keuangan yang sebelumnya eksklusif menjadi inklusif), Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang

sistem pembayaran mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada tanggal 14 Agustus 2014. Bank Indonesia menetapkan roadmap elektronifikasi 2014-2024 melalui empat strategi utama diantaranya adalah (1) upaya perubahan perilaku masyarakat, (2) upaya perubahan perilaku pelaku industri sistem pembayaran ritel, (3) perluasan penerimaan instrumen dan layanan non tunai, (4) koordinasi kelembagaan dan regulasi untuk tujuan elektronifikasi.

Peningkatan implementasi elektronifikasi tahun 2016 dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia melalui beberapa upaya diantaranya akselerasi program elektronifikasi transaksi penerimaan daerah, edukasi instrumen non tunai dan keuangan inklusif pada masyarakat serta perluasan dan monitoring implementasi agen LKD. Pengembangan LKD dilakukan dalam bentuk edukasi/sosialisasi, kajian, monitoring implementasi LKD.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai tingkat inklusi keuangan dan determinan inklusi keuangan masyarakat di Kabupaten Jember dan Bondowoso, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara agregat tingkat inklusi keuangan di Kabupaten Bondowoso dan Jember sudah cukup baik yang diindikasikan dengan ketersediaan jumlah lembaga perbankan yang cukup dengan fasilitas pelayanan keuangannya. Namun sebagian masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau keuangan yang disebabkan oleh ketersediaan layanan yang masih relatif jauh dari masyarakat dan tingkat literasi keuangan yang masih rendah dan tertutupnya informasi dari masyarakat akibat ketakutan dan kekhawatiran dengan pemberi jasa keuangan individu lainnya.
2. Ketersediaan infrastruktur sistem layanan perbankan sudah cukup memadai melalui konsep *Branchless Banking* dan Layanan Keuangan Digital (LKD) sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan perbankan. Namun beberapa kendala masih dihadapi seperti keamanan sistem dari tindak penipuan menjadi perhatian penting dalam sistem layanan perbankan.

5.2 Rekomendasi

Beberapa rekomendasi berdasarkan hasil analisis adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat memiliki potensi cukup untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan yang diindikasikan dengan keinginan untuk mendapatkan segala informasi terkait keuangan.
2. Potensi masyarakat untuk menjadi *well literate* harus didukung oleh *stakeholder* terkait baik Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan sosialisasi mengenai peran dan manfaat penggunaan produk dan jasa keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1995. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta
- Bank Indonesia. 2011. Penerapan Branchless Banking di Indonesia. Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan. Preliminary Study. Jakarta.
- Bank Indonesia. 2016. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Timur. Agustus. Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Jawa Timur.
- Basu, P. 2006. *Improving access to finance for India's rural poor*. Washington, DC: The World Bank
- Beck, T., Demirguc-Kunt, A., & Levine, R. 2007. Finance, inequality and the poor. *Journal of Economic Growth*, 12, 27-49
- Beck, T., Demirguc-Kunt, A., Peria, M., & Soledad, M. 2006. *Banking services for everyone? Barriers to bank access and use around the world*. Working Paper Series No. 4079. World Bank Policy Research
- Chattopadhyay, Sadhan Kumar. 2011. Financial Inclusion in India : A Case – study of Bengal. RBI Working Paper WPS (DEPR) : 8
- Claessens, S. 2006. Access to Financial Services: A Review of the Issues and Public Policy Objectives, *The World Bank Research Observer* 21 (2), 207-240
- Cole, Shawn, Thomas Sampson, and Bilal Zia. 2008. Money or knowledge? What drives the demand for financial services in developing countries? Harvard Business School Working Paper, No. 09-117

- Hannig, Alfred, and Stefan Jansen. 2010. *Financial Inclusion and Financial Stability*. Working Paper, Tokyo: Asian Development Bank Institute
- Jaising, Naushita. 2013. *Financial Inclusion in Ghana : A Pre-Diagnostic Study*. Master Thesis IE School of International Relations
- Kempson E., Collard S., and Moore N. 2005. *Measuring Financial Capability : An Exploratory Study*. Financial Service Authority. Consumer Research Report. No. 37
- Kharchenko, Olga. 2011. *Financial Literacy in Ukraine : Determinants and Implications for Saving Behavior*. Thesis MA in Economics. Kyiv School of Economics
- Lyman TR, Ivatury G, Staschen S. 2006. *Use of Agents in Branchless Banking for The Poor: Rewards, Risks, and Regulations*. Focus Note No.38. CGAP. Washington DC.
- Rangkuti F. 2013. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis-Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Sarma, Mandira, and Jesim Pais. 2008. *Financial Inclusion and Development: A Cross Country Analysis*. Indian Council for Research on International Economic Relations, Madras School of Economics
- Sarma, Mandira. 2010. *Index of Financial Inclusion*. Discussion Papers in Economics. November
- Sharma, M. 2008. *Index of Financial Inclusion*. Working Paper no. 215, ICRIER.
- <http://ekbis.sindonews.com/read>
- <http://www.waspada.co.id/>
- <http://beritajatim.com/ekonomi/>
- <http://economy.okezone.com/read/2013/11/25/226/902082/literasi-keuangan-bagi-masyarakat>
- <http://keuangan.kontan.co.id/news/hanya-21-masyarakat-yang-paham-literasi-keuangan>

